

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, Firdaus. Dkk. *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- As-Shiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- As-Shiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Fossati, Diego. "Perpecahan Politik Islam dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia", dalam *Demokrasi Tanpa Demos (Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia)*, Depok: Penerbit LP3ES bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, 2021.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan kedelapan, Terj Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ramandey, Frits Bernard dkk, *Profil Otonomi Khusus Papua*, Jayapura Papua: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, 2005.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, Cetakan Kedua, 2022.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: Cv Mandar Maju, 2003.
- Silalahi, Ulber dkk. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan akuntabel*, Sumedang: IPDN Press, 2015.
- Soemantri M, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

- Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta, 2014.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung, Alfabeta, 2015.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Jogjakarta, Liberty, Cetakan ke II, 2000.
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

## B. Jurnal, Hasil Penelitian dan Makalah

- Asyari, Hasyim. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), *Refleksi Hukum (Jurnal IlmuHukum)*, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, 81-96.
- Bahtiar, Rais Agil. Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah, *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Srategis)*, Volume XIV, Nomor 8/II/Puslit/April/2022.
- Bhenjamin, Hoessein. *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II. Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi*. Jakarta: Disertasi Pascasarjana UI, 1993.
- Eka Santi, Rinda. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten Paser, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 7, Nomor 4, 2020: 516-527.
- Hartoko, Victorius Didik suryo. Otoritarianisme Versus Dukungan Terhadap Demokrasi, *Buletin Psikologi*, Volume 24, Nomor 2, 136-159, 2016. DOI: 10.22146/buletinpsikologi.22771
- Hsb, Ali Marwan. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 (The Democratic of Regional Election Based on Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Legislasi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, 227-234.
- Juanda dan Juanda, Ogiandhafis. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume VIII, Nomor 1, Juli 2022, 192-219.
- Kosasih, Ade. Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis, *Al-Imarah (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam)*, Volume 2, Nomor 1, 2017, 37-46.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1, 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Margianysah, Defbry. Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan Antara India, Hongaria, dan Turki, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*, Volume 11, Nomor 2, 2021, 264-300.
- Marwi, Akhmad. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan

Kota Mataram), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV, Nomor 3, Desember 2016

- M. Saragih, Tomy. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan, *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 3, Juli-September 2011.
- Nugroho Dwijowijoto, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003.
- Suharizal. Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, 2010, 93-112.
- V, Junaidi. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, 103-143, 2009.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Walikota.

### D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak, tertanggal 20 April 2022.

#### E. Internet

Bbc.com, Pj Gubernur: Menteri Tito klaim penunjukan sudah 'demokratis', tapi mengapa dituding 'tidak transparan' dan rentan 'dipolitisasi'? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61382329>, 12 Mei 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Lantik 5 Penjabat Gubernur, Mendagri Amanatkan Jaga Stabilitas Politik, Pemerintahan, dan Keamanan, <https://setkab.go.id/lantik-5-penjabat-gubernur-mendagri-amanatkan-jaga-stabilitas-politik-pemerintahan-dan-keamanan/>, diakses pada 20 November 2022.

Kompas.com, Artikel ditulis oleh Azyumardi Azra, Demokrasi, Hukum dan Penjabat Kepala Daerah, 28 Juli 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah>

Nadhil Attamimi, Detik Sulsel, 2 Pj Bupati di Sultra Tak Sesuai Usulan Gubernur ke Mendagri, Batal Dilantik, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6091378/2-pj-bupati-di-sultra-tak-sesuai-usulan-gubernur-ke-mendagri-batal-dilantik>, diakses pada 22 November 2022.

Redaktur ICW (Indonesian Corruption Watch), Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasi-dalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat>, diakses pada 21 November 2022

Republika.co.id., Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur yang Tertutup <https://repjabar.republika.co.id/berita/rbr3ag484/perludem-soroti-penunjukan-penjabat-gubernur-yang-tertutup>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Reporter Merdeka.com, Sesuai UU Pilkada, Masa Tugas Penjabat Kepala Daerah Tak Bisa Lebih dari 2 Tahun, <https://www.merdeka.com/politik/sesuai-uu-pilkada-masa-tugas-penjabat-kepala-daerah-tak-bisa-lebih-dari-2-tahun.html>, diakses pada 21 November 2022.

Rusdianto Sudirman, IAIN Parepare, Opini: Polemik Penunjukan PJ Kepala Daerah, <https://www.iainpare.ac.id/opini-polemik-penunjukan-pj-kepala-daerah/>, diakses pada 20 November 2022.

The Economist Intelligence Unit, A Report from EIU, Democracy Index 2021: The China Challenge, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>, diakses pada 04 Desember 2022

Redaktur Katadata, Katadata.co.id, Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>, diakses pada 28 November 2022